

**PELUANG PENERAPAN PENYIMPANAN MINUTA AKTA SECARA
ELEKTRONIK MENUJU ERA E-NOTARY BERDASARKAN UU NO. 2 TAHUN
2014 TENTANG JABATAN NOTARIS**

Oleh

Litha Nabilla Mallolongan¹ dan Hendry Julian Noor²

Intisari

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis peluang terkait penerapan penyimpanan minuta akta notaris yang di alih mediakan menjadi ke dalam bentuk elektronik dimana selama ini minuta akta notaris di simpan secara konvensional. Tujuan lain dari penelitian ini adalah mengetahui optimalisasi penyimpanan minuta akta notaris secara elektronik.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bersumber pada aturan-aturan hukum Jabatan Notaris beserta hukum Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Kearsipan yang merupakan sumber hukum tertulis. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 15 ayat 3 UUJN-P membuka peluang pada kegiatan notaris untuk dapat dilakukan secara elektronik. Pada Pasal 16 ayat 7 terdapat peluang diberlakukannya *cyber notary/e-notary* terhadap dokumen elektronik, maupun akta elektronik karena pembacaan akta dihadapan notaris adalah tidak wajib ketika para pihak memilih agar akta tersebut tidak dibacakan karena para pihak telah membacanya sendiri. Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Kearsipan, Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 5 ayat (4) huruf b UU ITE, memberikan interpretasi bahwa minuta akta notaris dapat disimpan secara elektronik. Dalam proses pengarsipan dokumen secara elektronik Peraturan Kepala ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) Nomor 20 tahun 2011 tentang Pedoman Autentikasi Arsip Elektronik, dapat dijadikan contoh atau pedoman. Autentikasi dalam peraturan tersebut dapat berupa memberikan tanda dan / atau pernyataan tertulis atau tanda lainnya yang dapat memberikan tanda bahwa arsip yang dimaksud merupakan arsip yang diambil dari data *original* atau *copy original*, dimaksud agar nilai otentiknya tetap melekat dan tidak berkurang sama sekali

Kata Kunci: Minuta Akta, Jabatan Notaris, Penyimpanan Konvensional, Arsip Elektronik, Pedoman Autentikasi, Nilai Otentik

¹ Ringroad Barat 38, Gatak, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

² Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jalan Sosio Yustisia Nomor 1 Bulaksumur, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

***THE OPPORTUNITY OF ELECTRONIC STORAGE IMPLEMENTATION OF
NOTARIAL DEED TOWARD E-NOTARY ERA BASED ON LAW NUMBER 2 OF 2014
CONCERNING NOTARY INCUMBENCY***

By

Litha Nabilla Mallolongan³ and Hendry Julian Noor⁴

Abstract

This research is intended to analyze the opportunities regarding notarial deeds storage which are converted in the form of electronic which usually notary deeds are stored conventionally. Another objective of this research is to find out the optimization of notary deeds electronic storage.

This research is a normative legal research, based on the legal rules of the Notary Incumbency along with Information and Electronic Transactions law and Archives Law which are the sources of written law. The analysis used in this research is qualitative and presented descriptively.

The results of this study indicate that Article 15 paragraph 3 of UUJN-P provides opportunities for notarial activities to be carried out electronically. Furthermore, in Article 16 paragraph 7 provides an opportunity for cyber notary/e-notary in implementing electronic documents, as well as electronic deeds because the recitation of deed in the presence of a notary is not mandatory when the party choose not to recite the deed because the party has recited it themselves. Article 68 paragraph (1) of the Archives Law, Government Regulation No. 28 of 2012 concerning the implementation of Law No. 43 of 2009 concerning Archives, and Article 5 paragraph (4) letter b of the ITE Law, provides an interpretation that notarial deeds can be stored electronically. In the process of electronically archiving documents, The Head of ANRI (National Archives of the Republic of Indonesia) Regulation Number 20 of 2011 concerning Guidelines for Electronic Archive Authentication, can be used as an example or guidelines. Authentication in these regulations can be in the form of giving and/or written statements or other signs that can indicate that the related archive is an archive taken from the original data or an original copy, so that the authentic value remains attached and not decreased at all.

Key Words: Notary Deed, Notary Incumbency, Conventional Storage, Electronic Archives, Authentication Guidelines, Authentic Value

³ Ringroad Barat 38, Gatak, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

⁴ Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jalan Sosio Yustisia Nomor 1 Bulaksumur, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta



**PELUANG PENERAPAN PENYIMPANAN MINUTA AKTA SECARA ELEKTRONIK MENUJU ERA
E-NOTARY BERDASARKAN UU NO. 2
TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS**
LITHA NABILLA MALLOLONGAN, Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn.
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>